

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan pariwisata, sebagian besar turis lokal maupun mancanegara datang ke Indonesia karena budaya dan keindahan alam, sumber daya alam yang dimiliki memberikan dukungan tersendiri bagi daya saing pariwisata Indonesia, keanekaragaman hayati serta keragaman budaya tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga menjadikan Indonesia memiliki potensi sektor pariwisata tak tergantikan yang terkenal keeksotisan dan keindahannya yang dapat menjadi daya tarik. Menurut World Economic Forum (WEF), Indonesia berada pada urutan ke 14 dalam potensi Natural Resources pada tahun 2017.¹

Pengertian Pariwisata sendiri adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakan kegiatan rekreasi ataupun liburan dan persiapan yang dilaksanakan untuk kegiatan tersebut.² Sedangkan dalam undang-undang pengertian pariwisata adalah berbagai macam wisata dan didukung sebagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.³ Dalam arti luas, Pariwisata memiliki pengertian kegiatan liburan yang dilakukan di luar rumah untuk melepas penat pekerjaan atau mencari suasana yang berbeda. Sebagai suatu kegiatan, pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat modern dan berkembang.

¹ Rusda Wajhillah, Agung Wibowo, Andi Riyanto, "Pengukuran Indikator Pengembangan Ekowisata dan Kualitas Perangkat Lunak Sistem Informasi", *Jurnal Pariwisata*, Vol 5, No.3 September 2018, Hlm 233

² Sarbini, *Paradigma Baru Pariwisata*, Yogyakarta. Kaukaba. 2010, hlm. 42.

³ Lihat pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Manusia dalam kegiatan hidupnya mempunyai tiga kegiatan utama, yaitu pertama, kegiatan untuk memperoleh pendapatan dengan bekerja; kedua kegiatan *maintenance* untuk pemulihan (misalnya tidur, makan, minum) dan ketiga; kegiatan yang berhubungan dengan memanfaatkan waktu luang, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk berwisata.⁴ Sebagai suatu produk khas suatu negara, pariwisata mempunyai banyak sifat menarik yang memungkinkan menjadi bagian dalam strategi pembangunan yang dapat dijalankan di banyak negara dunia ketiga. Selain menjadi sumber devisa, sektor pariwisata juga dapat mengubah ekonomi satu negara dari masyarakat pertanian tradisional menjadi industri yang lebih modern. Pariwisata baik bersifat nasional maupun internasional dianggap dapat mendorong laju pembangunan nasional karena berbagai keterkaitan ke belakang yaitu teknologi padat karya berskala kecil, dijalankan dan dimiliki oleh perusahaan lokal dan tidak banyak melakukan impor bahan. Pemakaian devisa dapat dihemat dan masyarakat setempat dapat memperoleh mandat dari lapangan pekerjaan yang memberikan hasil yang lebih besar.⁵

Pariwisata mempunyai peran terhadap peningkatan pendapatan nasional ataupun daerah, yaitu dalam peningkatan sektor lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti sektor ekonomi dan sektor sosial budaya.⁶ Kesempatan untuk bekerja untuk orang-orang yang berketerampilan dalam bidang kepariwisataan semakin berkembang banyak jumlahnya, pemasukan negara dari sektor pajak serta devisa pariwisata semakin bertambah, keadaan sosial masyarakat yang ikut peran dalam kepariwisataan menjadi lebih

⁴ Cahya Purnomo, "Persepsi Wisatawan Mancanegara Terhadap Mutu Produk Wisata di Kabupaten Bantul". *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, Vol.1, No.1, Juni 2010, 43-53

⁵ Heddy Shri Ahimsa-Putra, Diah Widiyastuti, "Pengembangan Pariwisata Pedesaan", Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, UGM, *Jurnal Nasional*, 2013.

⁶ Deddy Prasetya Maha Rani, "Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur". *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No.3, Agustus-Desember 2014.

baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan Kementerian Pariwisata, bahwa sektor pariwisata berada diposisi kedua penyumbang devisa terbesar, yaitu menyumbang devisa sebesar US\$ 13,586 Milyar setelah CPO sebesar US\$ 15,956 Milyar pada tahun 2016.⁷ Sehingga berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional.

Negara Indonesia, dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka pembangunan tersebut haruslah didasarkan pada kondisi khusus pada daerah bersangkutan dengan menggunakan potensi yang ada, baik potensi daya fisik dan kelembangaan. Keberadaan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah sangat diperlukan. Dalam melakukan pembangunan yang berkesinambungan maka pemerintah daerah haruslah untuk menggali secara terus menerus.

Realisasi otonomi daerah dapat dilihat dari sumber pembiayaan pemerintah daerah yang tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD tersebut terdiri antara lain retribusi daerah, pajak daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain sebagainya.⁸ Maka dari itu, pemerintah daerah atau kota harus berupaya untuk mengelola sumber-sumber PAD secara maksimal. Pemasukan yang berasal dari sektor pariwisata menjadi tumpuan utama dan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah, sehingga dalam memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat terus digali. Dalam melaksanakan potensi daerah tersebut, pemerintah daerah khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri telah mengatur pengelolaan anggaran untuk kemajuan

⁷ Tim Penulis Detik, "Tiga Tahun Jokowi-JK, Pariwisata Sumbang Devisa Terbesar Kedua" <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3687715/tiga-tahun-jokowi-jk-pariwisata-sumbang-devisa-terbesar-kedua>, diakses Pada tanggal 2 November 2019 Pukul 11.35 WIB

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

pariwisata yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota memiliki kekhasan masing-masing dan relatif masih alami yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan kualitas berskala nasional dan global. Potensi-potensi tersebut jika dimanfaatkan secara optimal akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi daerah masing-masing. Salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan masih harus dikembangkan adalah Kabupaten Bantul.

Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya yang dapat dikembangkan untuk Obyek Daya Tarik Wisata (yang selanjutnya disingkat dengan ODTW). Pada masa depan, kepariwisataan di Kabupaten Bantul cukup potensial untuk dapat dikembangkan sebagai daerah wisata *mass tourism* dan dirintisnya wisata minat khusus. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari data Dinas Pariwisata setempat bahwa hanya empat obyek wisata pantai yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Bantul. Keempat pantai yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah tersebut meliputi Pantai Parangtritis, Pantai Samas, Pantai Pandansimo dan Pantai Kwaru. Kabupaten Bantul sebenarnya masih memiliki empat obyek pantai lainnya yang cukup potensial untuk dikembangkan. ODTW minat khusus ini justru didorong untuk dapat dikembangkan, seiring meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara.

Sebagai daerah yang tidak dapat dipisahkan dari kepariwisataan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, peran Kabupaten Bantul amatlah penting. Kabupaten Bantul mempunyai nilai kepariwisataan yang tidak kalah dengan daerah lainnya di Yogyakarta. Obyek wisata di Bantul mempunyai prospek yang bagus dimasa yang akan datang,

sehingga dari hal itulah, pembangunan sektor pariwisata memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan masyarakat lokal, membuka lapangan kerja baru dan kesempatan berwirausaha serta mendukung kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan alam di Kabupaten Bantul.⁹

Dari sekian banyak obyek wisata pantai dan desa wisata yang telah dikenal dan dikunjungi oleh wisatawan baik masyarakat nasional maupun internasional, hanya beberapa obyek wisata yang telah menyumbang kontribusi kepada masyarakat lokal secara signifikan. Obyek Pariwisata tersebut dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dengan menanggarkan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah serta Dana Keistimewaan Yogyakarta yang khusus untuk memajukan potensi sektor pariwisata yang berwawasan budaya. Besarannya yaitu 6 Milyar rupiah untuk APBD Kabupaten Bantul, Rp 1,7 Milyar untuk DAK, dan Rp 8,2 Milyar untuk Dana Keistimewaan Yogyakarta yang dialokasikan untuk pengembangan sarana dan prasarana destinasi di Bantul.¹⁰

Dengan adanya anggaran tersebut, diharapkan Dinas Pariwisata Bantul dapat mengelola sektor pariwisata yang ada semaksimal mungkin dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kepariwisataan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. Namun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa masalah yang membuat kurang optimalnya pengelolaan anggaran untuk optimalisasi sektor pariwisata di

⁹ Faizal Hamzah, Hary Hermawan, Wigati, "Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat" *Jurnal Pariwisata*, Vol.5 No.3 September 2018, Hlm 196.

¹⁰ Tim Republika, "Bantul Anggarkan Rp 3 Miliar Untuk Sarana Prasarana Pariwisata" <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/17/p49u02284-bantul-anggarkan-rp-3-miliar-untuk-sapras-pariwisata>, diakses pada tanggal 05 November 2018, pukul 15:43.

Kabupaten Bantul. Dilihat dari Desa Wisata di Kabupaten Bantul yang memiliki sekitar 39 titik, ternyata tidak semuanya memiliki pengelolaan yang baik, banyak desa wisata tersebut hanya dikunjungi kurang dari 2.000 wisatawan bahkan ada yang tidak lebih dari 1.000 wisatawan pertahunnya. Desa wisata yang seperti sedemikian itu belum mampu mensejahterakan warga sekitar. Selain itu, dijumpai obyek-obyek wisata yang belum tersentuh campur tangan dari pemerintah daerah melalui dinas pariwisata, kurangnya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai, hal ini dikarenakan pengelolaan obyek wisata tersebut masih dengan mengandalkan penggunaan anggaran dari swadaya masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN UNTUK MENINGKATKAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kinerja sektor pariwisata?
2. Apa hambatan dalam meningkatkan potensi sektor pariwisata di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan diatas maka tujuan penulisan ini secara rinci bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengelolaan anggaran sektor pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan dalam pengelolaan dan peningkatan potensi sektor pariwisata di Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Peran Dinas Pariwisata dalam Pengelolaan anggaran untuk peningktan sektor pariwisata dan menjadi referesi bagi tim pelaksana pengelolaan aggaran dan dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam mengkaji dan mengenal kebijakan negara dalam pengelolaan anggaran dan potensi sektor pariwisata.

b. Bagi Pemerintah Daerah / Dinas Pariwisata Bantul

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan para pembuat aturan agar berjalan efektif terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana anggaran.